

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai bentuk praktik sosial dan medium komunikasi massa, film memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Film tidak sekadar hadir sebagai karya seni yang otonom, melainkan sebuah produk dari struktur sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakanginya. Dalam konteks komunikasi, film bekerja dengan cara menangkap realitas yang ada, lalu memindahkannya ke layar lebar. Sebagai sebuah wacana, film tidak pernah lepas dari ideologi yang membungkusnya. Oleh karena itu, film kerap bertransformasi menjadi arena pertarungan diskursif untuk memperebutkan opini publik dan menaturalisasi ideologi tertentu di benak khalayak (Hall, 1997).

Salah satu realitas sosial-politik yang sering dikonstruksi dalam narasi film adalah dinamika dunia jurnalisme, khususnya mengenai peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Dalam tatanan ideal, institusi pers dituntut untuk berdiri bebas agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pemantau kekuasaan (*watchdog*). Kovach dan Rosenstiel, dalam rumusan fundamental elemen jurnalisme, menegaskan bahwa loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga negara (*citizens*). Implikasi dari loyalitas ini adalah keharusan jurnalis untuk melayani sebagai pemantau kekuasaan yang independen. Tanpa adanya independensi yang kokoh, fungsi pers sebagai alat kontrol

sosial akan tumpul, dan media berisiko berubah menjadi sekadar corong propaganda bagi penguasa (Kovach & Rosenstiel, 2007:114).

Kendati demikian, manifestasi idealisme jurnalistik tersebut senantiasa berbenturan dengan hegemoni kekuasaan negara. Atas nama stabilitas politik dan dogma keamanan nasional, instrumen negara kerap melancarkan intervensi represif terhadap otonomi redaksional. Bentuk intervensi ini tidak hanya bersifat psikologis, tetapi mewujud dalam ancaman litigasi hukum, pembatasan akses informasi, hingga sensor langsung. Dialektika antara upaya media mempertahankan independensi dan represi pemerintah yang berupaya memonopoli informasi inilah yang direkonstruksi secara tajam dalam film *The Post* (2017). Film ini memvisualisasikan bagaimana kebebasan pers dinegosiasikan dan dipertahankan di bawah ancaman pemidanaan dari cabang eksekutif melalui krisis sejarah *Pentagon Papers*,

Film *The Post* (2017) arahan sutradara Steven Spielberg ini memvisualisasikan bagaimana kebebasan pers dinegosiasikan di bawah ancaman pemidanaan dari administrasi Presiden Richard Nixon. Fokus narasi tidak sekadar berpusat pada substansi dokumen rahasia tersebut, melainkan pada pergolakan internal yang dialami oleh Katharine Graham selaku penerbit *The Washington Post* dan Ben Bradlee selaku eksekutif redaksi. Mereka dihadapkan pada dilema eksistensial: mematuhi perintah pembungkaman dari penguasa yang mengancam keberlangsungan perusahaan, atau menerbitkan kebenaran dengan risiko penjara.

Untuk membongkar kedalaman makna dari relasi kuasa tersebut, penelitian ini tidak membedah film sekadar dari struktur naratifnya, melainkan memosisikannya sebagai sebuah sistem tanda yang kompleks. Pemaknaan tanda dalam sinema merupakan proses interpretasi yang hidup guna melacak ideologi dominan (Sobur, 2001). Dengan menggunakan pendekatan Semiotika Roland Barthes, penelitian ini tidak berhenti pada pemaknaan harfiah. Pendekatan ini secara presisi digunakan untuk membongkar signifikasi bertingkat: mulai dari makna denotasi atas wujud intervensi, makna konotasi atas perlawanan redaksional, hingga dekonstruksi mitos supremasi kebebasan pers yang sengaja dinaturalisasi oleh teks film tersebut.

Signifikansi pemilihan topik ini didasarkan pada urgensi untuk memperkaya kajian mengenai relasi media dan negara dalam perspektif sinema. Penelitian terdahulu mengenai film ini pernah dilakukan oleh Handayani dan Kristanty dengan judul "Representasi 9 Elemen Jurnalisme Dalam Film *The Post*". Penelitian tersebut membedah kemunculan sembilan elemen jurnalisme secara umum menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce (Handayani & Kristanty, 2020:2). Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian ini membatasi fokus masalah secara lebih spesifik pada aspek "Independensi Media" dan "Intervensi Pemerintah". Selain itu, penggunaan analisis Semiotika Roland Barthes dalam penelitian ini menawarkan kebaruan untuk menggali makna denotasi, konotasi, dan mitos di balik representasi keberanian pers yang ditampilkan dalam film.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka fokus penelitian ini adalah mengenai Independensi Media Atas Intervensi Pemerintah Dalam Film *The Post* (2017). Selanjutnya agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka fokus penelitian tersebut diturunkan ke dalam pertanyaan penelitian berdasarkan dimensi analisis Semiotika Roland Barthes, sebagai berikut:

1. Bagaimana makna denotasi mengenai sikap independensi media dalam menghadapi intervensi pemerintah yang digambarkan dalam film *The Post*?
2. Bagaimana makna konotasi mengenai sikap independensi media dalam menghadapi intervensi pemerintah yang digambarkan dalam film *The Post*?
3. Bagaimana mitos kebebasan pers dikonstruksi sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni negara dalam narasi film *The Post*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membongkar sistem tanda visual maupun verbal yang merepresentasikan independensi media dalam menghadapi represi kekuasaan pada teks sinematik *The Post* (2017). Melalui pisau bedah Semiotika Roland Barthes, kajian ini difokuskan untuk menganalisis signifikasi bertingkat mulai dari pemaknaan denotasi dan konotasi atas otonomi ruang redaksi saat berhadapan dengan instrumen intervensi politik, hingga secara radikal mendekonstruksi mitos kebebasan

pers yang diwacanakan sebagai instrumen perlawanan ideologis terhadap hegemoni negara.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis makna denotasi mengenai sikap independensi media dalam menghadapi intervensi pemerintah yang digambarkan dalam film *The Post*.
2. Menganalisis makna konotasi mengenai sikap independensi media dalam menghadapi intervensi pemerintah yang digambarkan dalam film *The Post*.
3. Untuk mendeskripsikan konstruksi mitos kebebasan pers sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni negara dalam narasi film *The Post*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan bagi pengembangan khazanah keilmuan di bidang Ilmu Komunikasi, khususnya pada konsentrasi Jurnalistik dan Studi Sinema. Secara spesifik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai representasi etika jurnanisme dalam budaya populer. Selain itu, penggunaan pendekatan semiotika Roland Barthes dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi metodologis bagi civitas akademika dalam membedah teks media film sebagai instrumen komunikasi massa yang tidak hanya berfungsi sebagai

hiburan, tetapi juga sarat akan nilai ideologis dan konstruksi realitas sosial-politik.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, khususnya bagi mahasiswa dan praktisi media sebagai bahan refleksi mengenai urgensi mempertahankan independensi redaksi dan idealisme profesi di tengah tekanan intervensi politik maupun hukum. Bagi lingkungan akademik, khususnya perpustakaan fakultas dan Program Studi Jurnalistik, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi pustaka untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa, serta menjadi materi edukasi literasi media bagi masyarakat luas mengenai pentingnya kebebasan pers dalam ekosistem demokrasi. Lebih jauh lagi, bagi para sineas atau kreator konten, temuan ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana mengemas isu-isu krusial seputar hukum pers dan dilema redaksional menjadi narasi visual yang edukatif tanpa kehilangan unsur dramatisnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Landasan Teoritis

Landasan teoritis dalam penelitian ini berfungsi sebagai fondasi analitis untuk membedah bagaimana sebuah karya sinema mengonstruksi realitas politik dan etika profesi. Penelitian ini menempatkan Teori Semiotika Roland Barthes sebagai teori utama (*grand theory*) karena fokus utama kajian

adalah pada mekanisme pembentukan makna dan pembongkaran ideologi di balik tanda-tanda visual dalam film. Selanjutnya, Teori Tanggung Jawab Sosial dan konsep Sembilan Elemen Jurnalisme diposisikan sebagai teori pendukung (*supporting theory*) yang memberikan kerangka normatif untuk memahami konteks independensi media yang menjadi pokok permasalahan dalam narasi film tersebut.

Analisis terhadap film *The Post* sebagai teks budaya mendasarkan diri pada Teori Semiotika yang dikembangkan oleh Roland Barthes. Barthes merupakan tokoh sentral dalam perkembangan semiologi yang menggeser fokus kajian tanda dari sekadar linguistik (kebahasaan) menuju analisis kebudayaan yang lebih luas. Secara historis, pemikiran Barthes merupakan pengembangan dari strukturalisme Ferdinand de Saussure, namun Barthes melangkah lebih jauh dengan meneliti bagaimana fenomena keseharian termasuk film, fotografi, dan mode bekerja layaknya bahasa yang membawa muatan ideologis tertentu. Barthes memandang bahwa tidak ada pesan yang benar-benar polos atau netral; setiap objek visual yang ditampilkan dalam media massa selalu merupakan hasil konstruksi budaya yang bertujuan melanggengkan nilai-nilai tertentu (Sobur, 2001: 15).

Asumsi fundamental teori ini memandang bahwa tanda (*sign*) bekerja melalui proses bertingkat untuk menghasilkan makna yang sering kali tidak disadari oleh khalayak. Tanda dalam pandangan Barthes adalah sesuatu yang hidup dan dihidupi (*cultivated*) dalam proses interpretasi yang mengalir. Kekuatan utama pendekatan Barthes terletak pada kemampuannya

membongkar apa yang disebut sebagai "naturalisasi sejarah," yaitu proses di mana konstruksi budaya yang bersifat politis dibuat seolah-olah terlihat wajar, alamiah, dan memang seharusnya terjadi. Dalam konteks film, setiap pengambilan sudut kamera (*angle*), pencahayaan, hingga pemilihan kostum tokoh bukan sekadar estetika, melainkan kode-kode yang menyembunyikan kepentingan ideologis pembuatnya (Sobur, 2013: 69).

Dimensi operasional teori Barthes yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan istilah "Peta Tanda" (*Sign Map*) yang membagi sistem pemaknaan ke dalam dua tatanan pertandaan (*two order of signification*). Tatanan pertama adalah Denotasi, yang merujuk pada makna harfiah, definisional, dan objektif dari sebuah tanda. Denotasi menggambarkan realitas fisik yang tertangkap mata secara langsung tanpa campur tangan tafsir emosional. Pada level ini, analisis akan difokuskan untuk mendeskripsikan secara detail elemen-elemen visual yang tampak dalam adegan intervensi pemerintah, seperti siapa aktor yang terlibat, bagaimana gestur tubuhnya, serta dialog apa yang diucapkan secara tekstual.

Tatanan kedua adalah Konotasi, yang muncul ketika tanda denotatif bertemu dengan perasaan, emosi, dan nilai-nilai kebudayaan pengguna tanda tersebut. Konotasi menjelaskan "cara" tanda tersebut digambarkan untuk membangkitkan asosiasi tertentu di benak penonton. Dalam penelitian ini, konotasi menjadi jembatan untuk memahami bagaimana suasana ketegangan di ruang redaksi atau intimidasi dari pejabat negara divisualisasikan melalui teknik sinematografi untuk membangun simpati atau antipati. Puncak dari

proses ini adalah Mitos, yang terjadi ketika makna konotatif telah mengendap dan dianggap sebagai kebenaran kolektif. Mitos berfungsi sebagai sistem komunikasi yang mengubah sejarah menjadi alam (*nature*), yang dalam penelitian ini akan digunakan untuk membongkar bagaimana film mengonstruksi mitos "Pers sebagai Pahlawan Demokrasi" dalam melawan tirani negara (Sobur, 2013: 128).

Pemanfaatan Semiotika Roland Barthes sebagai teori utama dipandang sangat tepat karena objek penelitian ini adalah film yang merupakan sistem tanda visual yang kompleks. Konflik antara independensi media dan intervensi pemerintah dalam film *The Post* tidak disampaikan secara verbal semata, melainkan melalui simbol-simbol visual yang memerlukan dekoding mendalam. Pendekatan Barthes memungkinkan peneliti untuk tidak terjebak pada alur cerita permukaan, melainkan masuk ke struktur dalam (*deep structure*) untuk menemukan bagaimana ideologi kebebasan pers dipertarungkan melalui bahasa gambar.

Sebagai landasan substantif untuk memahami konteks perilaku media yang dianalisis, penelitian ini menggunakan Teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*) yang kemudian dioperasionalkan melalui Sembilan Elemen Jurnalisme karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. Teori Tanggung Jawab Sosial muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai kritik dan penyempurnaan atas teori Libertarian yang dianggap gagal karena melahirkan pers yang sensasional dan tidak bermoral. Komisi Hutchins pada tahun 1947 merumuskan bahwa kebebasan pers yang dijamin demokrasi

harus disertai dengan kewajiban publik. Media tidak hanya berhak untuk "bebas dari" (*freedom from*) kekangan pemerintah, tetapi juga harus "bebas untuk" (*freedom for*) melayani kepentingan masyarakat dan menjaga pilar demokrasi (Siebert et al., 1956: 74).

Konsep normatif tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam praktik jurnalisme modern oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. Mereka merumuskan sembilan elemen jurnalisme berdasarkan riset panjang terhadap praktisi media untuk mendefinisikan kembali apa itu jurnalisme sejati di tengah gempuran komersialisasi. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Oleh karena itu, loyalitas pertama jurnalisme haruslah kepada warga negara (*citizens*), bukan kepada pemilik modal ataupun penguasa politik. Kepatuhan terhadap prinsip ini menjadi indikator utama dalam menilai integritas sebuah institusi pers (Kovach & Rosenstiel, 2007: 52).

Relevansi Teori Tanggung Jawab Sosial sebagai teori pendukung terletak pada fungsinya sebagai penyedia konteks dan standar nilai. Jika Semiotika Barthes berfungsi sebagai "cara membaca" tanda, maka teori ini berfungsi sebagai "kamus" untuk memahami arti dari tanda tersebut. Teori ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi apakah adegan-adegan dalam film tersebut merupakan representasi dari pelanggaran etika atau justru manifestasi dari kepahlawanan pers dalam menegakkan demokrasi.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai peta pemikiran yang memberikan batasan tegas mengenai istilah-istilah kunci yang digunakan, guna menghindari kesalahpahaman interpretasi antara peneliti dan pembaca. Bagian ini akan menguraikan definisi operasional dari variabel-variabel utama yang terdapat dalam judul penelitian, yakni Independensi, Media, Intervensi Pemerintah, dan Film, yang didasarkan pada rujukan literatur ilmiah yang relevan.

1.5.2.1 Independensi

Independensi dalam konteks jurnalistik sering kali dimaknai secara idealis sebagai kenetralan mutlak atau posisi di mana media berdiri di tengah-tengah tanpa keberpihakan. Namun, Musfialdy menjelaskan bahwa dalam praktiknya, independensi adalah sebuah dinamika yang jauh lebih kompleks karena isi media yang sampai kepada khalayak sesungguhnya tidak lahir dari ruang hampa yang bebas nilai. Berita merupakan produk akhir dari tarikan kepentingan antara kebijakan internal organisasi media dan pengaruh eksternal yang melingkupinya, sehingga independensi bukan berarti media tidak memiliki sikap, melainkan kemampuan untuk menjaga objektivitas di tengah gempuran pengaruh tersebut (Musfialdy, 2019: 21).

Pada tataran operasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa setiap institusi media senantiasa melakukan seleksi isu berdasarkan standar para pengelolanya, sebuah proses yang dikenal dengan istilah *gatekeeping*.

Proses penyeleksian ini tidak jarang menyebabkan pemberitaan dianggap berat sebelah atau subjektif oleh sebagian pihak yang merasa dirugikan. Namun, esensi sejati dari independensi terletak pada upaya redaksi untuk tetap menyajikan rekonstruksi fakta yang mendekati kebenaran substansial, meskipun harus berhadapan dengan kebijakan redaksional yang ketat maupun tekanan pemilik modal.

Dalam konteks penelitian ini, independensi didefinisikan secara spesifik sebagai keteguhan sikap institusi pers dalam mempertahankan otonomi penyuntingan berita dari tekanan pihak luar, khususnya kekuasaan politik. Independensi di sini dimaknai sebagai keberanian moral untuk memprioritaskan hak publik atas informasi yang benar di atas kepentingan keselamatan bisnis media itu sendiri. Hal ini menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah tindakan tokoh-tokoh dalam film *The Post* mencerminkan integritas jurnalistik atau justru bentuk kompromi yang mencederai etika profesi.

1.5.2.2 Media

Media massa memiliki kekuasaan yang sangat signifikan dalam membentuk persepsi publik karena kemampuannya yang unik dalam mengonstruksi realitas sosial. Muslich menegaskan bahwa apa yang disajikan oleh media baik surat kabar, radio, maupun televisi sering kali berbeda dengan realitas sesungguhnya yang terjadi di lapangan karena telah melalui proses pembingkaihan (*framing*). Melalui teks dan narasi yang disusun secara sengaja, media menggiring khalayak untuk memahami sebuah peristiwa

sesuai dengan perspektif yang dibangunnya, sehingga khalayak sering kali mempercayai representasi media sebagai kebenaran mutlak tanpa menyadari adanya bias konstruksi di baliknya (Muslich, 2008: 159).

Di balik kemampuan konstruksi tersebut, media harus berdiri di atas landasan filosofis yang kuat agar tidak kehilangan arah. Sumadiria menegaskan bahwa filosofi media berarti sesuatu yang menjadi cita-cita ideal, landasan pokok, atau pijakan dasar yang senantiasa menjiwai seluruh kebijakan, peraturan, serta orientasi sikap dan perilaku suatu media dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Setiap media harus memiliki idealisme, yakni obsesi atau sesuatu yang terus dikejar dengan segala daya dan cara yang dibenarkan menurut etika dan norma profesi. Menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran, adalah contoh konkret idealisme yang harus senantiasa diperjuangkan oleh pers (Sumadiria, 2004: 120).

Dengan menggabungkan fungsi konstruksi dan landasan filosofis tersebut, maka dalam penelitian ini media tidak sekadar dipahami sebagai alat penyalur informasi (*to inform*), melainkan institusi yang memiliki kekuatan untuk memberi makna (*to define*). Media berperan sebagai agen yang melakukan internalisasi nilai-nilai demokrasi kepada publik. Dalam film yang diteliti, media diposisikan sebagai pilar keempat demokrasi (*The Fourth Estate*) yang sedang menjalankan idealismenya untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan, meskipun harus menghadapi risiko besar demi mempertahankan prinsip keadilan yang menjadi nyawa dari eksistensinya.

1.5.2.3 Intervensi Pemerintah

Intervensi pemerintah merupakan bentuk campur tangan kekuasaan negara yang bersifat distorsif terhadap kebebasan pers dan arus informasi publik. Syahri menjelaskan bahwa berita seharusnya menjadi rekonstruksi tertulis dari sebuah fakta yang disampaikan apa adanya agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh. Namun, intervensi pemerintah sering kali masuk secara paksa ke ruang redaksi, baik melalui sensor langsung maupun regulasi yang membatasi, yang memaksa wartawan untuk tidak menyampaikan fakta secara transparan. Akibat tekanan ini, fungsi pers sebagai cermin realitas menjadi retak dan informasi yang sampai ke publik menjadi tidak utuh (Syahri, n.d.: 1).

Dampak turunan dari intervensi ini adalah munculnya fenomena penghalusan bahasa atau eufemisme dalam produk jurnalistik sebagai strategi bertahan hidup. Wartawan sering kali terpaksa menggunakan diksi yang samar untuk menyamarkan kritik tajam agar berita tetap bisa terbit tanpa memicu kemarahan penguasa. Syahri menyoroti bahwa konsekuensi dari penggunaan bahasa eufemisme akibat ketakutan terhadap sensor ini menyebabkan makna kejadian yang sesungguhnya menjadi kabur, sehingga masyarakat kehilangan haknya untuk mengetahui bobot persoalan yang sebenarnya terjadi dalam pemerintahan.

Dalam kerangka penelitian ini, intervensi pemerintah didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan represif negara, mulai dari ancaman pembredelan, tuntutan hukum, hingga intimidasi fisik, yang bertujuan untuk

membungkam fungsi kontrol sosial media. Intervensi ini dilihat sebagai variabel penghambat utama yang menguji kualitas independensi media. Penelitian ini akan menyoroti bagaimana upaya negara menggunakan dalih "keamanan nasional" (*national security*) sesungguhnya merupakan taktik politis untuk menutupi kebohongan publik dan melanggengkan kekuasaan.

1.5.2.4 Film

Film merupakan medium ekspresi artistik dan kultural yang memiliki posisi unik dalam sejarah perkembangan seni dan komunikasi. Ariansah menyatakan bahwa meskipun usianya relatif lebih muda dibandingkan seni lainnya, film telah membuktikan diri sebagai medium yang otonom dan mampu memicu perdebatan estetika yang mendalam. Sejak kelahirannya pada akhir abad ke-19, film telah menjadi arena dialektika antara kaum realis yang melihatnya sebagai perekam kenyataan murni, dan kaum formalis yang melihatnya sebagai seni manipulasi gambar, yang membuktikan bahwa film adalah teks budaya yang kompleks dan setara dengan karya seni tinggi lainnya (Ariansah, 2005:1).

Sebagai saluran komunikasi massa, kekuatan film terletak pada kemampuannya untuk menyampaikan pesan secara audio-visual yang menyentuh emosi khalayak. Film bekerja dengan merepresentasikan kembali realitas melalui kode-kode sinematik yang terstruktur, seperti teknik penyuntingan (*editing*), pengambilan sudut kamera (*camera angle*), dan tata cahaya (*lighting*). Elemen-elemen teknis ini bukan sekadar hiasan, melainkan

bahasa visual yang membawa muatan makna denotatif dan konotatif untuk mempengaruhi persepsi penonton terhadap isu yang diangkat dalam cerita.

Dalam penelitian ini, film *The Post* tidak dipandang semata-mata sebagai karya fiksi sejarah atau hiburan komersial, melainkan sebagai artefak komunikasi yang mendramatisasi pertarungan nilai-nilai jurnalistik. Film ini dianggap sebagai media edukasi yang merekam kembali peristiwa sejarah pers yang krusial. Melalui analisis semiotika, peneliti akan membedah bagaimana film ini menggunakan bahasa visualnya untuk mengonstruksi mitos kepahlawanan jurnalis dan membangun opini publik mengenai pentingnya kebebasan pers dalam sebuah negara demokrasi.

1.6 Langkah-langkah Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Mengingat penelitian ini merupakan kajian budaya dan teks media yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika, maka penelitian ini tidak terikat pada batasan geografis atau lokasi fisik institusi tertentu selayaknya penelitian lapangan. Lokasi atau objek material utama yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah film berjudul “*The Post*”, sebuah karya sinema bergenre drama sejarah yang disutradarai oleh Steven Spielberg dan dirilis pada tahun 2017. Film ini berdurasi 116 menit dan diproduksi oleh *Amblin Entertainment* serta *DreamWorks Pictures*. Oleh karena itu, lokus penelitian ini berada dalam ruang lingkup teks audio-visual yang terdapat dalam film tersebut, meliputi adegan, dialog, dan simbol-

simbol visual yang merepresentasikan dinamika redaksi surat kabar *The Washington Post*.

Pemilihan film “*The Post*” sebagai lokus penelitian didasarkan pada alasan akademik yang kuat mengenai signifikansi muatan pesan yang dikandungnya. Film ini tidak sekadar hadir sebagai produk hiburan, melainkan sebagai rekonstruksi peristiwa sejarah faktual mengenai penerbitan *Pentagon Papers* yang menjadi tonggak penting dalam sejarah kebebasan pers dunia. Alasan utama menjadikan film ini sebagai lokasi penelitian adalah karena narasi di dalamnya secara eksplisit dan dramatis menggambarkan pertarungan diametral antara independensi media melawan intervensi pemerintah, sebuah isu yang sangat relevan dengan kajian ilmu jurnalistik dan komunikasi politik. Film ini menyediakan data visual yang kaya mengenai proses pengambilan keputusan redaksional di bawah tekanan hukum dan politik, yang sangat tepat untuk dibedah menggunakan pisau analisis semiotika Roland Barthes.

Selain aspek substantif, pemilihan lokasi penelitian pada teks film ini juga didasarkan pada ketersediaan dan aksesibilitas data yang memadai untuk dianalisis secara mendalam. Film “*The Post*” menyajikan kualitas sinematografi, tata artistik, dan keaktoran yang detail, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tanda-tanda denotatif dan konotatif secara presisi, mulai dari ekspresi mikro para tokoh hingga penggunaan pencahayaan yang simbolis. Peneliti mengakses film ini melalui platform media digital legal dengan resolusi tinggi guna memastikan setiap elemen

visual dapat diamati dengan jelas tanpa distorsi, sehingga proses pembacaan tanda untuk menemukan mitos di balik representasi independensi media dapat dilakukan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

Paradigma penelitian merupakan landasan filosofis yang menjadi pijakan dalam menentukan cara peneliti memandang realitas, memperoleh pengetahuan, serta menjelaskan hubungan antara peneliti dengan objek penelitian. Paradigma tidak hanya berfungsi sebagai kerangka metodologis, tetapi juga sebagai sistem keyakinan (*basic belief system*) yang memengaruhi keseluruhan proses penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Dalam penelitian komunikasi, paradigma menentukan bagaimana media dipahami, apakah sekadar sebagai saluran penyampaian pesan atau sebagai institusi yang memproduksi, mereproduksi, dan mempertahankan relasi kuasa dalam masyarakat (Denzin & Lincoln, 2018).

Berdasarkan karakteristik permasalahan yang berfokus pada relasi antara independensi media dan intervensi pemerintah dalam film *The Post* (2017), penelitian ini menggunakan Paradigma Kritis. Paradigma kritis memandang realitas sosial bukan sebagai sesuatu yang netral, melainkan sebagai hasil konstruksi historis yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, ideologi, dominasi, dan kepentingan politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, tujuan penelitian tidak hanya memahami makna yang dibangun dalam

teks media, tetapi juga mengungkap mekanisme kekuasaan yang bekerja di balik representasi tersebut serta menunjukkan bagaimana realitas tertentu dinaturalisasi sebagai sesuatu yang dianggap wajar (Denzin & Lincoln, 2018).

Secara ontologis, paradigma kritis berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial bersifat *historically constituted*, yaitu dibentuk melalui proses sejarah, budaya, ekonomi, dan politik yang berlangsung dalam relasi kekuasaan. Dengan demikian, representasi mengenai kebebasan pers, negara, maupun demokrasi dalam film bukanlah gambaran objektif atas kenyataan, melainkan hasil konstruksi ideologis yang diproduksi melalui sistem tanda. Film *The Post* dipahami sebagai teks budaya yang memuat kepentingan tertentu sehingga setiap adegan, dialog, maupun unsur sinematografi perlu dibaca secara kritis untuk menemukan makna yang tersembunyi di balik representasi tersebut.

Secara epistemologis, paradigma kritis menempatkan hubungan antara peneliti dan objek penelitian sebagai hubungan yang bersifat dialogis serta transaksional. Peneliti tidak diposisikan sebagai pengamat yang netral, melainkan sebagai subjek yang secara sadar melakukan pembacaan kritis terhadap teks media untuk mengungkap relasi kuasa dan ideologi yang bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu, proses interpretasi tidak berhenti pada deskripsi makna, tetapi diarahkan pada pembongkaran struktur dominasi yang disamarkan melalui bahasa, simbol, maupun narasi visual sehingga

menghasilkan pemahaman yang bersifat reflektif dan emansipatoris (Denzin & Lincoln, 2018).

Penerapan paradigma kritis dalam penelitian ini membawa implikasi bahwa film *The Post* dipahami sebagai arena pertarungan wacana antara media dan negara. Narasi mengenai perjuangan *The Washington Post* dalam menerbitkan *Pentagon Papers* tidak diperlakukan hanya sebagai alur dramatik, melainkan sebagai representasi mengenai hubungan kuasa antara institusi pers dengan pemerintah. Melalui paradigma kritis, peneliti berupaya mengidentifikasi bagaimana film membangun legitimasi terhadap nilai kebebasan pers sekaligus memperlihatkan berbagai bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan melalui instrumen hukum, kekuasaan politik, maupun pembatasan akses informasi.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hubungan sebab akibat ataupun menghasilkan generalisasi, tetapi untuk mengkritisi mekanisme produksi makna yang membentuk cara masyarakat memahami hubungan antara media dan negara. Paradigma kritis memberikan ruang bagi peneliti untuk membongkar ideologi yang dinaturalisasi dalam teks film sehingga representasi mengenai independensi media maupun intervensi pemerintah dapat dipahami sebagai hasil dari proses sosial, politik, dan budaya yang sarat kepentingan.

Berangkat dari landasan paradigma kritis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena

memungkinkan peneliti memahami fenomena komunikasi melalui interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam teks media, bukan melalui pengukuran statistik ataupun pengujian hipotesis. Penelitian kualitatif menempatkan makna, konteks, pengalaman, serta proses sosial sebagai fokus utama penelitian sehingga sesuai dengan karakter analisis film yang menitikberatkan pada interpretasi simbol, narasi, dan representasi visual (Denzin & Lincoln, 2018).

Strategi analisis yang digunakan adalah Semiotika Roland Barthes, karena film dipahami sebagai sistem tanda yang menghasilkan makna melalui hubungan antara unsur visual, verbal, dan kultural. Menurut Sobur (2001), semiotika merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengkaji tanda serta menjelaskan bagaimana tanda menghasilkan makna dalam suatu sistem komunikasi. Dalam penelitian ini, setiap dialog, ekspresi tokoh, komposisi gambar, pencahayaan, warna, properti, maupun teknik pengambilan gambar diperlakukan sebagai tanda yang dianalisis untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya.

Proses analisis dilakukan secara bertahap melalui tiga tingkat pemaknaan Roland Barthes, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Tahap denotasi digunakan untuk mendeskripsikan makna literal dari setiap adegan berdasarkan apa yang tampak secara visual maupun verbal. Tahap konotasi digunakan untuk menjelaskan makna implisit yang muncul melalui hubungan antar tanda dalam konteks budaya dan komunikasi. Selanjutnya, tahap mitos diarahkan untuk mengidentifikasi ideologi yang dinaturalisasi melalui

representasi film, khususnya mengenai independensi media, intervensi pemerintah, kebebasan pers, dan relasi kuasa dalam sistem demokrasi.

Dalam perspektif paradigma kritis, analisis semiotika Roland Barthes tidak berhenti pada proses pemaknaan tanda, tetapi digunakan sebagai instrumen kritik terhadap ideologi yang bekerja di balik teks media. Barthes menegaskan bahwa mitos merupakan mekanisme budaya yang mengubah konstruksi historis menjadi sesuatu yang tampak alamiah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana film *The Post* membangun makna mengenai kebebasan pers, tetapi juga mengungkap bagaimana nilai-nilai tersebut diproduksi, dilegitimasi, dan dinaturalisasi sehingga membentuk cara pandang tertentu terhadap hubungan antara media dan pemerintah (Sobur, 2001).

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai representasi independensi media atas pemerintah dalam film *The Post* (2017). Temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada seluruh produk media, melainkan dipahami secara kontekstual berdasarkan objek penelitian. Validitas penelitian ditentukan oleh kedalaman interpretasi, konsistensi argumentasi, serta keterkaitan antara data visual, dialog, teori semiotika Roland Barthes, dan teori-teori komunikasi yang digunakan dalam penelitian.

1.6.3 Metode Penelitian

Dalam melakukan kajian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai kerangka metodologis utama. Landasan penggunaan metode ini adalah efektivitasnya dalam membedah fenomena yang bersifat interpretatif, di mana peneliti berusaha menggali makna di balik perilaku manusia dan teks media tanpa melibatkan perhitungan numerik. Riset kualitatif mampu menghasilkan deskripsi yang mendalam karena berfokus pada pemahaman fenomena secara holistik. Hal ini relevan dengan tujuan penelitian untuk membedah isu independensi pers dalam film *The Post* sebagai refleksi dari realitas sosial yang dialami oleh para praktisi jurnalisme.

Metode deskriptif diimplementasikan agar peneliti dapat menguraikan fakta secara terperinci mengenai representasi independensi wartawan. Melalui metode ini, setiap detail dalam film tidak hanya dipandang sebagai jalinan cerita, melainkan sebagai data ilmiah yang menunjukkan pola hubungan antara pers dan pemerintah. Pendekatan ini sangat efektif untuk menjelaskan dinamika dilema etis jurnalis saat menghadapi intervensi politik. Peneliti berupaya merekonstruksi kembali pesan-pesan yang ada di dalam film agar dapat dipahami secara faktual oleh pembaca dalam konteks keilmuan jurnalistik.

Guna mencapai analisis yang tajam, penelitian ini menggunakan analisis semiotika Roland Barthes sebagai pisau bedah datanya. Alasan pemilihan semiotika terletak pada hakikat film sebagai sistem komunikasi massa yang dibangun oleh tanda-tanda visual dan verbal. Sobur (2001: 15)

menekankan bahwa analisis tanda sangat penting untuk memahami bagaimana sebuah makna diproduksi secara sistematis. Dengan memfokuskan analisis pada sistem pertandaan Barthes, peneliti dapat mengungkap makna konotatif dari adegan-adegan intervensi, yang pada gilirannya akan membongkar ideologi di balik representasi peran jurnalis sebagai pengawas kekuasaan dalam narasi film tersebut.

Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan studi dokumentasi dan pengamatan mendalam terhadap elemen-elemen fundamental jurnalisme yang muncul dalam film (Kovach & Rosenstiel, 2001). Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif ini memfasilitasi peneliti untuk menghubungkan teks film dengan konteks sejarah dan teori kekuasaan media. Melalui pengolahan data yang teliti, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bagaimana media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki kekuatan besar untuk membentuk dan mengonstruksi realitas di tengah masyarakat (Muslich, 2008: 1).

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

1.6.4.1 Jenis Data

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data kualitatif, yang merujuk pada informasi non-numerik yang diperoleh melalui pengamatan mendalam terhadap teks film. Penggunaan data kualitatif ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan pendekatan subjektif dalam paradigma penelitian. Peneliti memosisikan diri sebagai instrumen kunci yang berupaya memaknai

realitas sosial yang dikonstruksi dalam film *The Post*. Menurut Wekke dkk. (2019: 28), data kualitatif sangat efektif untuk menangkap konteks alamiah dan keutuhan fenomena yang sedang diteliti, khususnya dalam hal ini adalah isu independensi jurnalisme.

Karakteristik data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan interpretatif. Data tersebut tidak hanya terpaku pada apa yang tampak di permukaan, tetapi juga mencakup makna-makna tersirat di balik simbol-simbol sinematik. Hal ini sejalan dengan prinsip semiotika yang memandang data sebagai kumpulan tanda yang harus dibongkar secara mendalam (Sobur, 2001: 15).

Untuk menunjang analisis, data dikelompokkan menjadi data primer yang berasal langsung dari unit analisis film, serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. Integrasi kedua jenis data kualitatif ini bertujuan untuk menghasilkan interpretasi yang valid dan komprehensif. Dengan merujuk pada elemen-elemen jurnalisme dan sejarah pers, peneliti dapat memberikan argumen yang kuat mengenai bagaimana kekuasaan media massa bekerja dalam membangun realitas subjektif melalui simbol-simbol yang dihadirkan (Muslich, 2008: 159).

1.6.4.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data untuk menjamin akurasi analisis, yakni sumber data primer dan sumber data

sekunder. Penentuan sumber data ini disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dalam membedah teks film secara mendalam.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diposisikan sebagai subjek inti yang menyediakan data pokok secara langsung bagi peneliti. Dalam konteks analisis semiotika ini, yang menjadi sumber data primer adalah karya sinematografi bertajuk *The Post* yang dirilis secara resmi pada tahun 2017. Film bertema drama sejarah ini merupakan hasil produksi kolaboratif antara Amblin Entertainment dan DreamWorks Pictures di bawah arahan sutradara Steven Spielberg, dengan total durasi penayangan sepanjang 116 menit atau sekitar 1 jam 56 menit. Peneliti menetapkan film ini sebagai subjek utama karena perannya sebagai lokus yang merekonstruksi fenomena independensi media saat berhadapan dengan intervensi kekuasaan, sekaligus menjadi sumber primer dari tanda-tanda yang akan dibedah secara mendalam. Data pokok yang diekstraksi dari sumber ini meliputi:

Rangkaian Adegan Terpilih (Scene Segments): Fragmen film yang dikurasi secara sengaja karena secara eksplisit mempertunjukkan ketegangan antara manajemen redaksi *The Washington Post* dengan otoritas pemerintah, termasuk momen krusial dalam pengambilan keputusan etis.

Elemen Visual dan Estetika Sinematik: Deskripsi mendetail mengenai penanda visual yang mencakup bahasa tubuh para jurnalis saat berada di bawah tekanan, pengaturan latar kantor redaksi klasik, penggunaan intensitas

cahaya untuk membangun suasana intimidasi, serta teknik pengambilan gambar yang menonjolkan relasi kekuasaan (Sobur, 2001: 15).

Dialog dan Narasi Verbal: Transkrip percakapan antar karakter yang merepresentasikan perdebatan mengenai profesi jurnalisme, risiko hukum dalam pengungkapan rahasia negara, serta dialektika antara hak publik untuk tahu melawan argumen keamanan nasional.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang digunakan untuk memperkaya interpretasi, memperluas wawasan sejarah, dan memperkuat struktur teoretis penelitian. Keberadaan data sekunder sangat vital dalam analisis semiotika guna memvalidasi konteks sosial dan ideologis agar interpretasi peneliti tetap berpijak pada fakta yang relevan. Sumber data sekunder ini meliputi:

Literatur Teoretis: Berbagai buku referensi, jurnal ilmiah, dan dokumen pustaka yang mengupas tuntas mengenai metodologi Semiotika Roland Barthes, teori otonomi media, serta paradigma kritis dalam komunikasi massa.

Konteks Sejarah dan Jurnalistik: Catatan historis asli mengenai skandal Pentagon Papers tahun 1971, biografi tokoh-tokoh nyata yang terlibat, serta prinsip-prinsip dalam elemen jurnalisme dan Kode Etik Jurnalistik sebagai tolok ukur nilai idealisme pers.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis diposisikan sebagai parameter atau batasan satuan teks yang menjadi objek bedah utama dalam penelitian ini. Surokim (2016) menegaskan bahwa identifikasi unit analisis sangat membantu peneliti dalam menjaga konsistensi pengolahan data agar tetap fokus pada masalah yang diangkat. Oleh karena itu, unit analisis dalam riset ini adalah elemen-elemen audio-visual di dalam film *The Post* yang merepresentasikan konflik antara otonomi redaksional dan pengaruh kekuasaan pemerintah. Penetapan batasan ini dilakukan agar peneliti dapat memilah data secara efektif tanpa kehilangan konteks naratif film secara keseluruhan.

Kategori unit analisis dalam riset ini dibagi menjadi dua bagian, yakni unsur visual dan unsur verbal. Di sisi lain, unsur verbal berfokus pada kutipan dialog yang mengandung muatan nilai-nilai independensi pers. Menurut Sobur (2001), melalui pemisahan unit analisis tersebut, peneliti dapat mengeksplorasi setiap tanda untuk menemukan makna konotatif maupun mitos yang terkandung di dalamnya. Pengelompokan ini bertujuan agar proses analisis data dapat dilakukan secara mendalam dan terstruktur.

Terakhir, penggunaan unit analisis ini berfungsi untuk mendukung ketajaman analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan peneliti. Dengan memusatkan perhatian pada unit-unit dialog dan visual yang signifikan, peneliti dapat menarik kesimpulan yang valid mengenai bagaimana film *The Post* mengonstruksi realitas jurnalistik. Integrasi antara batasan unit analisis dan metode semiotika ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang

utuh mengenai fenomena independensi media di tengah tantangan politik yang kompleks.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Proses pemerolehan data dalam kajian ini dilaksanakan melalui integrasi teknik observasi tekstual, studi dokumentasi, dan tinjauan pustaka yang seluruhnya diorientasikan pada kebutuhan analisis Semiotika Roland Barthes. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan prinsip identifikasi tanda, di mana setiap elemen film dipandang sebagai sebuah sistem komunikasi yang membawa pesan-pesan ideologis. Menurut Wekke (2019: 28), teknik pengumpulan data kualitatif harus mampu menjangkau makna di balik fenomena yang tampak, sehingga peneliti dapat membangun argumen yang solid mengenai bagaimana film *The Post* mengonstruksi realitas independensi media di tengah intervensi kekuasaan.

Pada tahap awal, teknik observasi diimplementasikan secara intensif untuk memetakan penanda visual dan verbal yang merepresentasikan tekanan politik terhadap pers. Pengamatan ini difokuskan pada level denotatif, di mana peneliti mencatat detail sinematografi secara objektif sebagai fondasi awal analisis. Langkah ini sejalan dengan prosedur riset Sari dkk. (2019: 2) yang menekankan bahwa ketelitian dalam mengamati ekspresi dan suasana ruang redaksi sangat krusial untuk menemukan tanda-tanda otonomi redaksional. Melalui observasi yang berulang, peneliti dapat memastikan bahwa tidak ada simbol penting yang terlewatkan dalam proses identifikasi data primer.

Pendekatan ini kemudian diperkuat dengan teknik studi dokumentasi melalui pengambilan gambar adegan (*capturing*) dan pencatatan transkrip dialog secara sistematis. Sebagaimana dijelaskan oleh Sobur (2001: 15), pendokumentasian tanda secara fisik merupakan syarat mutlak dalam analisis semiotika agar peneliti dapat melakukan pembacaan bertingkat, mulai dari makna denotasi hingga penafsiran konotatif yang lebih mendalam. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti empiris yang menghubungkan antara realitas fiksi dalam film dengan pesan-pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh sutradara terkait etika dan perjuangan jurnalisme investigasi.

Sebagai penyempurna, teknik tinjauan pustaka dilibatkan untuk menyediakan basis data kontekstual yang diperlukan dalam mencapai tahap analisis "Mitos" dalam kerangka Barthes. Dengan mengonfrontasi temuan visual dalam film dengan literatur sejarah dan teori kekuasaan media, peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih luas mengenai ideologi yang bekerja di balik teks tersebut. Penggunaan berbagai literatur pendukung ini memastikan bahwa proses pengumpulan data memiliki validitas akademik yang kuat dan berpijak pada landasan teoretis yang mapan (Surokim, 2016). Melalui metode pengumpulan data yang terintegrasi ini, diharapkan fenomena independensi media dapat terpotret secara akurat dan ilmiah.

1.6.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Implementasi triangulasi dalam kajian ini merupakan keputusan metodologis yang paling fundamental guna menjamin validitas hasil

interpretasi peneliti. Mengingat riset kualitatif terhadap media film sangat rentan terhadap subjektivitas interpretatif, triangulasi hadir sebagai mekanisme kontrol yang menyilangkan berbagai sumber informasi untuk memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi. Menurut Wekke dkk. (2019: 28), penggunaan multisumber dalam proses verifikasi data merupakan syarat mutlak untuk menangkap keutuhan fenomena sosial. Hal ini bertujuan agar konstruksi makna yang dihasilkan peneliti mengenai independensi media tidak terjebak dalam opini tunggal, melainkan didukung oleh bukti-berbagai literatur pendukung yang relevan.

Ketepatan teknik ini semakin nyata ketika dihubungkan dengan hakikat film *The Post* yang merepresentasikan realitas historis jurnalisme Amerika Serikat. Triangulasi sumber memungkinkan peneliti untuk melakukan sinkronisasi antara simbol-simbol sinematik dengan fakta sejarah asli terkait kebocoran dokumen rahasia negara. Alasan ini sangat krusial mengingat penelitian teks media memerlukan landasan empiris untuk menjelaskan latar belakang sosial dan politik dari sebuah adegan. Dengan demikian, triangulasi berfungsi untuk memperkuat objektivitas penelitian, memastikan bahwa setiap tanda intervensi yang dibedah memiliki korelasi yang jelas dengan realitas profesionalisme pers pada masa tersebut.

Selain itu, dukungan triangulasi teori memberikan ketajaman ekstra bagi pisau analisis semiotika Roland Barthes yang digunakan. Dengan mengonfrontasi temuan semiotik terhadap standar etika jurnalisme global, peneliti dapat menghasilkan analisis yang lebih terukur dan sistematis (Sobur,

2001: 15). Strategi ini sangat efektif untuk membongkar mitos-mitos ideologis yang terkandung dalam teks film secara objektif. Pada akhirnya, penerapan triangulasi secara menyeluruh bertujuan untuk mewujudkan prinsip otentisitas dan transparansi data, sehingga kesimpulan penelitian memiliki integritas ilmiah yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam diskursus akademik (Surokim, 2016: 4).

1.6.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam riset ini dioperasikan melalui mekanisme interaktif yang menghubungkan tahapan manajemen data kualitatif dengan kerangka teoritis semiotika. Peneliti memosisikan analisis sebagai proses yang berkelanjutan, di mana setiap fenomena audio-visual dalam film *The Post* dikupas secara berlapis guna menyingkap makna yang tersembunyi. Sebagaimana dijelaskan oleh Wekke dkk. (2019: 28), transformasi data mentah menjadi pengetahuan ilmiah memerlukan ketajaman peneliti dalam melakukan reduksi, penyajian, dan verifikasi secara konsisten. Strategi ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menyentuh akar ideologis dari teks yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan melakukan reduksi data, Karena film *The Post* memiliki durasi 116 menit dengan ribuan elemen visual, peneliti harus melakukan penyaringan ketat melalui *purposive sampling*. Peneliti hanya akan mengambil adegan-adegan yang secara signifikan mengandung unsur intervensi kekuasaan (seperti ancaman hukum dari Gedung Putih) dan independensi media (seperti keteguhan Katharine Graham dalam

menerbitkan berita). Data yang bersifat dekoratif atau tidak relevan dengan rumusan masalah akan disisihkan.

Pada tahap akhir, peneliti melakukan sintesis dan verifikasi melalui teknik triangulasi teori guna menarik kesimpulan yang valid. Temuan-temuan semiotik dikonfrontasi kembali dengan literatur sejarah jurnanisme dan standar profesi wartawan untuk memastikan akurasi interpretasi. Menurut Surokim (2016: 4), proses verifikasi akhir ini sangat menentukan kualitas riset komunikasi karena berfungsi untuk menjamin bahwa seluruh temuan benar-benar berakar pada data yang autentik. Dengan menerapkan siklus analisis yang komprehensif ini, peneliti dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana independensi media dipotret dalam film *The Post* sebagai bagian dari perjuangan menegakkan kebenaran informasi.

1.6.9 Rencana Jadwal Penelitian

Pelaksanaan sebuah penelitian ilmiah memerlukan perencanaan yang matang dan struktur waktu yang terukur guna menjamin kualitas serta kredibilitas hasil temuan. Penentuan lokasi dan penyusunan linimasa riset berfungsi sebagai panduan strategis bagi peneliti dalam mengelola sumber daya, membatasi ruang lingkup kerja, dan memastikan setiap tahapan metodologis dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan adanya pembagian fase penelitian yang jelas, proses transisi dari pengumpulan data menuju analisis mendalam dapat dilakukan secara sistematis tanpa mengabaikan aspek ketelitian ilmiah (Surokim, 2016: 4).

Penelitian ini merupakan studi teks kualitatif (*library research*) yang berfokus pada analisis isi sebuah karya sinematografi. Berbeda dengan penelitian lapangan yang memerlukan kehadiran fisik peneliti di lokasi geografis tertentu, lokasi penelitian ini bersifat literer dan fleksibel. Lokasi penelitian berpusat pada ruang kerja mandiri peneliti yang dilengkapi dengan fasilitas perangkat digital untuk mengakses film *The Post* sebagai objek material, serta akses ke perpustakaan digital maupun fisik guna memperoleh referensi sekunder. Alasan pemilihan lokasi ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan peneliti dalam melakukan pengamatan secara intensif, berulang, dan mendalam (*close reading*) tanpa adanya gangguan eksternal yang dapat memengaruhi objektivitas interpretasi (Wekke et al., 2019: 28).

Rencana Jadwal Penelitian Rangkaian penelitian ini direncanakan berlangsung selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2024 hingga Mei 2025. Untuk menjaga kualitas analisis, linimasa penelitian dibagi ke dalam tiga tahap operasional sebagai berikut:

Tahap I: Pra-Penelitian dan Orientasi (Desember – Januari) Tahap awal difokuskan pada pengumpulan sumber data primer dan sekunder secara komprehensif. Aktivitas meliputi studi kepustakaan terhadap teori semiotika Roland Barthes, sejarah *Pentagon Papers*, dan literatur independensi media. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan identifikasi awal terhadap adegan-adegan dalam film *The Post* yang akan direduksi menjadi unit analisis utama.

Tahap II: Analisis dan Interpretasi Data (Februari – Maret) Tahap ini merupakan fase inti di mana peneliti membedah unit-unit analisis menggunakan tatanan pertandaan denotasi, konotasi, hingga pencapaian level mitos. Peneliti secara intensif melakukan interpretasi terhadap setiap simbol intervensi dan independensi, serta melakukan triangulasi sumber guna memvalidasi temuan film dengan realitas sejarah dan etika jurnanisme.

Tahap III: Finalisasi Laporan dan Verifikasi (April – Mei) Tahap akhir mencakup penyusunan laporan hasil penelitian secara utuh. Peneliti melakukan verifikasi akhir terhadap seluruh data untuk memastikan bahwa rumusan masalah telah terjawab secara akurat. Tahap ini juga mencakup proses penyempurnaan naskah melalui bimbingan serta persiapan draf akhir skripsi untuk diujikan secara akademik.

